

Analisis Pengaruh Penerapan Ekonomi Kreatif Terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating

Zulkarnaini¹, Diana², Yeni Irawan³, Hilmi⁴

^{1,2,3,4} Jurusan Tata Niaga Politeknik Negeri Lhokseumawe
Jln. B.Aceh Medan Km.280 Buketrata 24301 INDONESIA

¹zulkarnaini@pnl.ac.id

²diana@pnl.ac.id

³yeni_irawan@pnl.ac.id

⁴hilmi@pnl.ac.id

Abstrak— Perkembangan daerah menjadi satu indikator yang sangat berpengaruh untuk menentukan tingkat keberhasilan sebuah daerah. Berbagai upaya pemerintah daerah harus dilakukan dalam rangka mencapai tingkat keberhasilan yang ditandai dengan semakin mandirinya daerah. Saat ini, perkembangan ekonomi kreatif menjadi salah satu alternatif yang harus dituangkan dalam program pengembangan daerah dalam rangka mencapai tingkat kemandirian. Namun disisi lain kekuatan terhadap komitmen pemerintah daerah juga menjadi satu permasalahan yang sangat mendasar dalam mendukung sinergitas keberhasilan daerah. Oleh karena itu ketiga faktor tersebut merupakan kombinasi yang sangat relevan untuk dijadikan indikator bagi pengembangan daerah secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah melalui komitmen organisasi yang mampu menjadi moderator bagi tercapainya tujuan pemerintah daerah Kota Lhokseumawe. Penelitian ini mengambil sampel aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) melalui metode *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ekonomi kreatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah melalui komitmen organisasi yang kuat. Hal ini membuktikan bahwa betapa pentingnya pemerintah daerah untuk menciptakan berbagai inovasi dalam menciptakan program daerah yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya ekonomi kreatif. Disamping itu, komitmen aparatur pemerintahan menjadi dasar yang kuat dan harus dibangun secara berkesinambungan dalam melaksanakan program daerah, sehingga pada akhirnya mampu mencapai tingkat kemandirian daerah yang maksimal.

Kata kunci— Penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi, tingkat kemandirian daerah.

I. PENDAHULUAN

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengendalikan dan memajukan daerah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah dalam menciptakan program kerja yang mampu melahirkan *sustainability outcome*. Program-program tersebut harus memiliki korelasi dan kesinambungan antar program, sehingga dapat menghasilkan tujuan yang terintegrasi serta terukur menurut kapasitas dan kebutuhan. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mampu untuk memahami dengan baik bagaimana memformulasi program kerja yang tepat serta pengaruhnya terhadap pengembangan daerah. Disamping itu pemerintah juga harus menyadari sepenuhnya bahwa hak otonomi yang dimiliki merupakan modal terbesar dalam mewujudkan daerah yang maju. Hak serta kewajiban tersebut jelas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana setiap pemerintah daerah wajib untuk memahami dan menjalankan pemerintahannya sesuai dengan “kemampuan” yang dimiliki.

Menyinggung kemampuan pemerintah daerah tidak terlepas dari bagaimana mekanisme yang harus dipenuhi untuk melaksanakan tanggungjawab maupun mengatur serta mengurus sendiri urusan pemerintahan. Pemerintah daerah juga tidak akan terlepas dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, namun sepanjang tidak bertentangan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka pemerintah daerah tetap dapat mengendalikan urusan daerah demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya pemerintah pusat sangat mengharapkan bahwa pemerintah daerah melalui hak otonomi yang dimiliki akan dapat mencapai tingkat kemandirian yang maksimal, sehingga akan menambah nilai daerah melalui hasil yang diperoleh dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Tingkat kemandirian yang diinginkan oleh pemerintah pusat harus memenuhi standar maupun indikator yang sesuai dengan aturan berlaku, artinya pemerintah daerah harus memiliki visi dan misi yang diturunkan dalam bentuk program kerja atau kegiatan yang tepat. Kemampuan untuk menciptakan program kerja atau kegiatan daerah menjadi tuntutan pokok bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, melalui ide atau gagasan yang memiliki berkelanjutan harus digali dan dapat diimplementasikan secara nyata serta mampu mendorong lahirnya berbagai program atau kegiatan lainnya yang saling melengkapi. Dengan demikian langkah untuk mencapai tingkat kemandirian daerah akan mudah direfleksikan dalam semua aspek pembangunan baik yang bersifat sosial, budaya, ekonomi, hukum maupun politik.

Untuk mewujudkan dan menyelaraskan keseluruhan aspek tersebut, maka pemerintah daerah harus memiliki program yang mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui program atau kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat. Salah satu aspek yang sangat menonjol untuk mengangkat ekonomi daerah yaitu melalui penerapan ekonomi kreatif. Menurut Suryana (2013:35) bahwa “pada hakikatnya ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang mengutamakan pada kreativitas berfikir untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda yang memiliki nilai dan bersifat komersial”. Program atau kegiatan ekonomi kreatif telah menjadi program kerja pemerintah melalui Inpres Nomor 6 Tahun 2009 yang pada dasarnya ditujukan untuk membantu daerah-daerah agar dapat menggali potensi daerah melalui kreativitas yang mampu menciptakan daya saing dan daya cipta agar menjadi lebih berkembang dan bernilai guna bagi pertumbuhan daerah. Tidak dapat dipungkiri bahwa program pemerintah tersebut belum maksimal menyentuh daerah dan bahkan sebagian besar daerah di Indonesia masih

belum memahami dengan baik bagaimana serta apa dampak yang ditimbulkan akibat dari penerapan tersebut. Padahal apabila ditinjau lebih mendalam, industri kreatif atau ekonomi kreatif mampu menjadi sektor penggerak yang dapat menciptakan daya saing bagi sektor lainnya maupun daya saing daerah (Muzakar Isa: 2016). Oleh karena itu sudah selayaknya pemerintah daerah berfikir kembali untuk dapat memanfaatkan wewenangnya melalui otonomi daerah dalam rangka menciptakan program yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Penerapan ekonomi kreatif dapat dilakukan melalui kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah harus mencari segmen yang lebih sesuai dengan pola hidup masyarakat agar usaha yang dilakukan dapat terus dikembangkan. Persoalan ekonomi kreatif telah menjadi agenda nasional dimana pemerintah pusat sangat mengharapkan setiap daerah memiliki keunggulannya masing-masing yang dapat diwakili oleh produk atau jasa yang dihasilkan. Melalui output tersebut, suatu daerah akan memiliki nilai tambah yang luar biasa dalam jangka panjang, disamping pendapatan daerah sebagai ukuran kinerja menjadi lebih baik.

Menyinggung dua hal di atas, baik menyangkut penerapan ekonomi kreatif ataupun tingkat kemandirian daerah, tidak akan pernah tercapai apabila pemerintah daerah tidak memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan pemerintahannya dengan baik. Setiap pemerintah daerah dituntut untuk lebih mengedepankan loyalitas dalam memimpin daerah atau dengan kata lain bahwa pemerintah daerah harus memiliki integritas yang benar-benar kuat dan sehat. Hal ini sangat ditekankan oleh pemerintah pusat agar daerah dapat menjaga dan mengembangkan daerahnya seperti “rumah sendiri”. Pemerintah daerah yang telah memiliki komitmen yang kuat, akan lebih mudah mengembangkan daerahnya melalui berbagai program karena pada dasarnya kemauan keras tersebut tidak melihat materi, sehingga apapun yang dilakukan atas dasar tanggungjawab dan kebutuhan untuk terus berkembang.

Komitmen yang kuat dalam susunan atau struktur sebuah pemerintahan akan mampu menciptakan keyakinan dan dukungan serta loyalitas seseorang terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai organisasi (Mowday et.al., 1979). Komitmen yang kuat akan menyebabkan individu berusaha mencapai tujuan organisasi, berfikir positif dan berusaha berbuat yang terbaik bagi organisasinya. Sebaliknya, bagi individu dengan komitmen yang lemah akan cenderung untuk mementingkan diri dan kelompoknya sehingga akan melemahkan daerah dan pada akhirnya menciptakan daerah yang tidak mandiri.

Demikian pula halnya dengan pemerintah daerah Aceh, walaupun dinilai belum maksimal dalam mengembangkan ekonomi kreatif, namun Aceh tetap memiliki kekuatan yang sudah ada sejak masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda dengan berbagai potensi yang dimiliki seperti berbagai kuliner khas daerah sampai hasil rempah-rempah yang mampu diekspor ke luar negeri (Bakri:2018). Oleh karena itu sangatlah tepat apabila penerapan ekonomi kreatif menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten maupun Kota, agar setiap daerah pada akhirnya dapat melahirkan produk maupun jasa unggulan dan dapat menjadi daerah yang mandiri.

Pemerintah Kota Lhokseumawe sebagai salah satu daerah yang sangat terkenal dengan sumber daya alam minyak

dan gas bumi, ternyata masih “belum” memiliki produk unggulan yang dapat dijadikan ikon atau ciri khas daerah. Sangat disayangkan apabila potensi daerah yang sudah memiliki nama tersebut, tidak didukung oleh potensi lainnya yang memiliki ciri khas daerah yang dapat dibawa atau diingat oleh masyarakat lainnya saat berkunjung ke Lhokseumawe. Padahal apabila dilihat dari jumlah penduduk usia produktif adalah berkisar 65,7% atau sekitar 125.810 penduduk dari jumlah 191.407 penduduk (Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe: 2016). Jumlah tersebut seharusnya menjadi indikator bagi Kota Lhokseumawe bahwasanya begitu besar potensi masyarakat yang dapat didorong untuk mendukung pengembangan potensi daerah, khususnya ekonomi kreatif. Dilain sisi seharusnya pemerintah daerah *intens* memperhatikan permasalahan tersebut untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Apabila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Aceh seperti Pidie Jaya dengan kue khasnya “Ade”, Kabupaten Bireuen dengan Keripik Pisang dan kue Nagasari, Aceh Selatan dengan manisan Pala, sampai dengan Takengon dengan Kopi Arabica, maka Lhokseumawe masih sangat “tertinggal” untuk dikategorikan sebagai daerah yang memiliki ciri khas daerah. Walaupun deretan daerah tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk meningkatkan kemandirian daerah melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun paling tidak pemerintah daerah telah berbuat dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Barangkali untuk lebih meningkatkan pola pengembangan ekonomi kreatif Kota Lhokseumawe khususnya menjadi lebih berkembang, maka pemerintah daerah harus banyak belajar ke daerah-daerah lain yang sudah lebih maju seperti Malang, Bandung, Medan dan sebagainya.

Penelitian ini merupakan replikasi yang pernah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu di Indonesia, menyangkut bagaimana daerah dapat mengembangkan potensi daerahnya melalui penerapan ekonomi kreatif yang dapat dijadikan program unggulan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian daerah. Reiza Miftah Wirakusuma (2014) telah menyimpulkan bahwa Pulau Tidung yang merupakan daerah pantai dan terletak di Jakarta mampu menghasilkan kerajinan yang dibuat dari kerang serta menjadi daya tarik wisatawan dan mampu meningkatkan nilai PAD pemerintah Kota Jakarta. Disamping itu Muzakar Isa (2016) juga telah menemukan suatu nilai tambah bagi pemerintah Kota Surakarta, dimana ekonomi kreatif sektor kuliner yang telah membantu masyarakat, mendapat dukungan penuh dan peran sangat signifikan oleh berbagai stakeholder yang terdiri dari pemerintah daerah, lembaga keuangan, asosiasi, mass media, agen wisata atau event organizer, serta lembaga pendidikan dan pelatihan. Dari dua penelitian terdahulu tersebut, jelas terlihat bahwa pengembangan ekonomi kreatif sangat bernilai positif dan langsung berdampak pada masyarakat, disamping mengangkat nilai ekonomi daerah secara keseluruhan.

Zulkarnaini et.al. (2018) juga telah menemukan bahwa hasil survei terhadap penerapan ekonomi kreatif di Kabupaten Aceh Utara berpengaruh signifikan terhadap nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pemerintah daerah perlu untuk melakukan sinergisitas antara penerapan ekonomi kreatif disatu sisi dengan pengembangan potensi wisata daerah, sehingga maksimalisasi PAD dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu sangatlah beralasan

apabila langkah awal yang harus dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah survei untuk mengumpulkan bukti atau fakta secara empiris bahwa pada dasarnya pemerintah daerah sangat perlu untuk memperhatikan pengembangan Kota Lhokseumawe menjadi salah satu tujuan wisata dengan memiliki keunggulan atau ciri khas yang dapat dijadikan modal dasar untuk pengembangan daerah secara berkelanjutan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi positif bagi pemerintah daerah untuk kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk program ataupun kegiatan daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Apakah terdapat interaksi penerapan ekonomi kreatif dan komitmen organisasi terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.

Ekonomi Kreatif

Persoalan ekonomi kreatif masih merupakan hal baru yang saat ini sedang diterapkan oleh pemerintah kepada seluruh daerah yang ada di Indonesia. Menurut Inpres Nomor 6 Tahun 2009, ekonomi kreatif didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta individu yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Disamping itu Departemen Perdagangan Republik Indonesia (2008) merumuskan ekonomi kreatif sebagai upaya pembangunan ekonomi secara berkelanjutan melalui kreativitas dengan iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Definisi yang lebih jelas disampaikan oleh UNDP (2008) yang merumuskan bahwa ekonomi kreatif merupakan bagian integratif dari pengetahuan yang bersifat inovatif, pemanfaatan teknologi secara kreatif, dan budaya.

Menyinggung potensi wisata, maka kesempatan terhadap pengembangan ekonomi kreatif merupakan nilai lebih yang mampu dicapai oleh pemerintah daerah. Dalam rangka pengembangan potensi wisata, ekonomi kreatif tidak hanya melibatkan masyarakat atau komunitas sebagai sumber daya yang berkualitas, tetapi juga keterlibatan unsur birokrasi dengan pola *entrepreneurship* (kewirausahaan). Konsep keterlibatan birokrasi dalam ekonomi kreatif adalah bahwa birokrasi tidak hanya membelanjakan tetapi juga menghasilkan (*income generating*) dalam arti positif (Osborne dan Gaebler, 1992).

Komitmen Organisasi

Komitmen organisasi merupakan tingkat sejauh mana seorang karyawan atau staf memihak pada suatu organisasi tertentu dan tujuan-tujuannya, serta berniat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi tersebut (Arfan Ikhsan dkk.; 2000).

Mowday et.al. (1979), menyatakan bahwa komitmen adalah:

"The strength of an individual's identification with and involvement in a particular organization."

Komitmen organisasi merupakan nilai personal yang mengacu pada sikap loyal pada suatu organisasi. Komitmen organisasi terbangun apabila masing-masing individu

mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi dan atau profesi, yang antara lain adalah:

1. Identifikasi (*identification*), yaitu pemahaman atau penghayatan terhadap tujuan organisasi.
2. Keterlibatan (*involvement*), yaitu perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan atau perasaan bahwa pekerjaan tersebut adalah menyenangkan.
3. Loyalitas (*loyalty*), yaitu persaaan bahwa organisasi adalah tempatnya bekerja dan tinggal.

Mowday et.al. (1979) melihat berbagai situasi variasi antecedent dari affective commitment meliputi, karakteristik personal, karakteristik structural, karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan serta pengalaman kerja. Dari uraian tersebut Mowday memberikan pengertian komitmen organisasi sebagai seorang yang memiliki nilai dan keinginan untuk tetap tinggal menjadi anggota organisasi. Anggota organisasi seharusnya memiliki kerelaan untuk mempertimbangkan kekuasaannya demi organisasi.

Selanjutnya tiga karakteristik yang berhubungan dengan komitmen organisasi menurut Cherrington (1996) adalah:

1. Keyakinan dan penerimaan yang kuat terhadap nilai dan tujuan organisasi.
2. Kemauan untuk sekuat tenaga melakukan yang diperlukan untuk kepentingan organisasi.
3. Keinginan yang kuat untuk menjaga keanggotaan dalam organisasi.

Meyer dan Allen (1997) mengemukakan tiga komponen mengenai komitmen organisasi, yang antara lain adalah:

1. Komitmen afektif (*affective commitment*), terjadi apabila karyawan ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (*emotional attachment*) atau psikologis terhadap organisasi.
2. Komitmen kontinu (*continuance commitment*), muncul apabila karyawan tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain, atau karena karyawan tersebut tidak menemukan pekerjaan lain. Dengan kata lain, karyawan tersebut tinggal di organisasi karena membutuhkan organisasi tersebut.
3. Komitmen normatif (*normative commitment*), timbul dari nilai-nilai diri karyawan. Karyawan bertahan menjadi anggota organisasi karena memiliki kesadaran bahwa komitmen terhadap organisasi merupakan hal yang seharusnya dilakukan. Karyawan tersebut tinggal dalam organisasi karena merasa berkewajiban untuk hal tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, batasan komitmen organisasi secara eksplisit baru mencakup satu sisi, yaitu komitmen anggota terhadap organisasi (*Employee's Commitment to Organization / ECO*). Lebih lanjut Reichers memberikan pemahaman komitmen organisasi sebagai *"a monolithic, undifferentiated entity that elicits an identification and attachment on the part of individual"*. Dia mempertegas mengapa seseorang berkeinginan untuk tetap tinggal ataupun meninggalkan organisasi. Untuk memahami dan memprediksi sikap dan tindakan seseorang terhadap organisasi tempat mereka bekerja, diperlukan melihat kecocokan antara individual dan organisasi yang bersangkutan.

Tingkat Kemandirian Daerah

Pada prinsipnya kemandirian daerah merupakan wujud dari keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat atau masyarakat yang wajib bertanggungjawab atas seluruh penggunaan anggaran. Pemerintah yang dikatakan berhasil dan berkinerja baik adalah pemerintah yang siap dan tidak tergantung kepada pihak manapun, termasuk kepada pemerintah pusat. Fenomena dewasa ini pemerintah daerah sangat tertolong dengan bantuan dari pemerintah pusat. Program-program yang dirumuskan dalam anggaran untuk dijalankan dalam satu periode seharusnya mampu untuk menciptakan kesinambungan yang makin meningkat dari waktu ke waktu. Namun sebagian besar pemerintah daerah belum menyadari permasalahan ini sehingga perlu memahami lebih jauh hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai sebuah tingkat kemandirian tersebut.

Tingkat kemandirian daerah seharusnya merupakan implementasi dari Undang-undang otonomi daerah yang dapat diukur melalui "hubungan situasional" dengan pemerintah pusat. Terdapat empat hubungan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat menurut Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Abdul Halim (2004:188) sebagai berikut:

1. Pola hubungan instruktif, peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah).
2. Pola hubungan konsultatif, campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu, melaksanakan otonomi.
3. Pola hubungan partisipatif, peranan pemerintah pusat semakin berkurang, mengingat daerah yang bersangkutan tingkat kemandiriannya mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi.
4. Pola hubungan delegatif, campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan urusan otonomi daerah.

Dari pola hubungan yang dipaparkan di atas jelas terlihat bahwa terdapat empat situasi yang dapat dihubungkan dengan tingkat kemandirian suatu daerah. Dalam hal ini, sebuah daerah yang sudah mampu melaksanakan otonomi dengan baik, berarti tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat sudah berkurang, malah mungkin tidak ada sama sekali. Kondisi ini jelas menunjukkan tingkat kemandirian daerah yang dapat diukur dari kondisi anggaran ataupun realisasi anggaran yang diperoleh oleh pemerintah daerah setiap periode.

Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka hipotesis penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penerapan ekonomi kreatif berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.
2. Komitmen organisasi mempengaruhi hubungan interaksi penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi, dan tingkat kemandirian daerah.

Definisi dari masing-masing variabel penelitian adalah sebagai berikut :

- 1) **Penerapan Ekonomi Kreatif (X₁)** merupakan kegiatan ekonomi berdasarkan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan daya kreasi dan daya cipta yang bernilai ekonomis dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat (Inpres Nomor 6 Tahun 2009).
- 2) **Komitmen Organisasi (X₂)** didefinisikan sebagai tingkat sampai sejauh mana seseorang memihak pada organisasi dan tujuan-tujuannya, serta bersikap dan berperilaku sesuai sistem nilai organisasi, yang menguntungkan bagi perkembangan dan kesejahteraan dua belah pihak dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Variabel ini diukur dari dua dimensi yaitu komitmen anggota terhadap organisasi (Mowday et.al.: 1979) dan dimensi komitmen organisasi terhadap anggota (Wiener, 1982).
- 3) **Tingkat Kemandirian Daerah (Y)**, diukur melalui ukuran kemampuan pemerintah daerah dalam menggali kemampuan PAD serta penerimaan daerah lainnya dibandingkan dengan total penerimaan daerah yang diperoleh dari pemerintah pusat (Sukanto Reksohadiprojo dalam Abdul Halim, 2004:350).

Jenis penelitian ini adalah survei dengan menggunakan *deskriptif verifikatif* dengan tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, faktual dan akurat serta meneliti hubungan antar variabel dengan uji statistik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian terhadap masalah-masalah berupa fakta-fakta saat ini dari suatu populasi dan bertujuan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan *current status* dari subjek yang diteliti (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002). Sedangkan penelitian *verifikatif* bertujuan untuk mengetahui kejelasan hubungan suatu variabel (menguji hipotesis) melalui pengumpulan data di lapangan.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Jumlah SKPD Pemerintah Kota Lhokseumawe saat ini adalah 35 SKPD. Alasan pemilihan populasi sasaran karena berkaitan dengan elemen-elemen populasi spesifik yang relevan dengan tujuan atau masalah penelitian (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:119).

Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur yang menduduki jabatan manajerial di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe. Metode yang dipakai dalam penentuan sampel adalah *purposive sampling*, yaitu memilih subjek yang berada pada posisi terbaik untuk memberikan informasi yang diperlukan (Sekaran; 2003:277). Alasan pemilihan aparatur yang memiliki jabatan manajerial adalah agar memperoleh kondisi yang lebih jelas dan tepat sesuai dengan kinerja yang telah dilaksanakan.

Mengacu pada metode penentuan sampel di atas, maka sampel terpilih dibatasi pada kriteria sebagai berikut:

1. Memahami dengan baik operasional pelaksanaan anggaran pemerintahan.
2. Menduduki jabatan eselon II dan eselon III.
3. Berpengalaman minimal 2 tahun pada posisi jabatan pemerintahan.

Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan di atas maka jumlah responden yang terpilih berjumlah 130 responden.

Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah suatu usaha sadar untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis dengan prosedur yang telah ditetapkan (Suharsimi Arikunto, 2002:123).

Sumber data yang akan digunakan dan dianalisis dalam penelitian ini adalah jenis data primer (*primary data*). Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli tanpa melalui perantara (Nur Indriantoro dan Bambang Supomo, 2002:147).

Metode Transformasi Data

Data pada penelitian ini diperoleh dari jawaban kuesioner para responden yang menggunakan skala ordinal. Agar dapat dianalisis secara statistik maka data tersebut harus dinaikkan menjadi skala interval dengan menggunakan *Methods of Successive Interval (MSI)* dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Menentukan frekuensi (f) responden yang menjawab skor 1,2,3,4,5,6,7 untuk setiap item pertanyaan
- 2) Selanjutnya menentukan proporsi (p) dengan cara setiap frekuensi dibagi dengan banyaknya responden
- 3) Menghitung proporsi kumulatif (PK)
- 4) Menentukan nilai z untuk setiap PK yang diperoleh dengan menggunakan tabel distribusi normal
- 5) Menentukan nilai skala (*scale value* = SV) untuk setiap skor jawaban.

Sesuai dengan nilai skala ordinal ke interval, yaitu *scale value* (SV) yang nilainya terkecil (harga negatif yang terbesar) diubah menjadi dengan 1 (satu):

$$\text{Transformed Scale Value} - Y = SV + I \text{ SV min } I + 1$$

Setelah ditransformasikan dari skala ordinal menjadi skala interval maka dapat dianalisis lebih lanjut dengan menggunakan program SPSS.

Metode Analisis Data

Dalam suatu penelitian kesahihan (*validitas*) dan kehandalan (*reability*) suatu hasil penelitian tergantung pada alat pengukur (*instrument*) yang digunakan dan data yang diperoleh. Jika alat ukur yang digunakan tersebut tidak sah dan tidak handal maka hasilnya tidak menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Untuk itu diperlukan dua macam pengujian yaitu tes kesahihan (*test validity*) dan tes kehandalan (*test of reability*).

Untuk dapat menganalisis data dalam penelitian ini maka digunakan analisis regresi linear sederhana (*simple linier regression*) untuk mengetahui pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah (Persamaan 1) dan *Moderated Regression Analysis (MRA)* untuk melihat interaksi pengaruh desentralisasi sebagai variable moderating (Persamaan 2).

Dari variabel yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat diturunkan model penelitian sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \varepsilon_1 \dots\dots\dots(1)$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_1 X_2 + \varepsilon_2 \dots\dots\dots(2)$$

dimana:

- Y = Tingkat Kemandirian Daerah
- β_0 = Konstanta, yaitu nilai Y jika nilai seluruh variable lain nol

- β_1 = Koefisien regresi dari X_1
- β_2 = Koefisien regresi dari X_2
- X_1 = Penerapan Ekonomi Kreatif
- X_2 = Komitmen Organisasi
- $X_1 X_2$ = Interaksi Penerapan Ekonomi Kreatif dan Komitmen Organisasi
- ε = *Error term* dari variabel lain

Untuk menguji regresi dengan variabel moderator dapat dilakukan dengan cara menguji interaksi atau dikenal dengan sebutan *Moderated Regression Analysis (MRA)*. Metode tersebut merupakan aplikasi khusus dari regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen), sehingga apabila diturunkan persamaannya untuk membuktikan nilai interaksi variable yang memoderasi hubungan antara variable X dan Y, maka dapat dilakukan dengan menghitung derivatif pertama (Imam Ghozali, 2002: 94).

Dari persamaan (2) di atas, maka dapat dihitung derivasi pertama dari X_1 untuk membuktikan adanya interaksi variabel moderating yaitu X_2 sebagai berikut:

$$dY/dX_1 = \beta_1 + \beta_2 X_2 \dots\dots\dots(3)$$

Apabila variable X merupakan moderating variable, maka koefisien β_2 harus signifikan pada 0.05 atau 0.10. Efek moderasi yang signifikan atau tidak, didasari oleh peningkatan R^2 yang signifikan pada persamaan tersebut. Fokus utama yang diperhatikan dalam penelitian ini adalah signifikansi indeks koefisien dan sifat pengaruh interaksi satu variabel moderating yaitu Komitmen Organisasi terhadap hubungan antara Penerapan Ekonomi Kreatif dengan Tingkat Kemandirian Daerah.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis akan diuji asumsi klasik yang mendasari penggunaan persamaan model regresi berganda sehingga data-data yang akan digunakan dalam pengujian hipotesis bebas dari kemungkinan penyimpangan asumsi klasik, yaitu tidak bias dan memiliki varians yang minimum.

Asumsi klasik yang utama menurut Gujarati (2003:339) terdiri dari :

- 1) Normalitas variabel gangguan (*disturbance error*)
 Dalam regresi linear diasumsikan bahwa residual ε_i merupakan variabel acak yang mengikuti distribusi normal dengan $\Sigma(\varepsilon_i) = 0$ dan $\text{Var}(\varepsilon_i)$ atau $\Sigma(\varepsilon_i) = \sigma^2$. Bentuk gangguan ε_i diintroduksi ke dalam model agar dapat menampung berbagai hal yang diakibatkan oleh pengaruh galat (*error*), seperti error dari variabel yang tidak dimasukkan ke dalam model dan kesalahan elemen-elemen yang melekat pada perilaku manusia.
- 2) Tidak terdapat multikolinearitas
 Multikolinearitas adalah suatu keadaan dimana satu atau lebih variabel independen berkorelasi dengan variabel independen lainnya, suatu variabel independen merupakan fungsi linear dari variabel independen lainnya.
- 3) Tidak terdapat heteroskedastisitas
 Heteroskedastisitas terjadi karena perubahan situasi yang tidak tergambar dalam model regresi secara spesifik atau jika residual tidak memiliki varians yang konstan. Ini biasanya terjadi pada data *cross section*.
- 4) Tidak terdapat autokorelasi

Autokorelasi dapat diartikan sebagai korelasi yang terjadi di antara anggota-anggota dari serangkaian observasi yang berdekatan waktunya (data *time series*) atau berdekatan tempatnya (data *cross section*).

Dalam penelitian ini tidak semua asumsi model regresi tersebut akan diuji. Asumsi yang tidak akan diuji adalah *autokorelasi*. Autokorelasi tidak diuji dengan alasan karena data yang akan dikumpulkan dan diolah merupakan data *cross section* bukan data *time series* yang merupakan penyebab terjadinya autokorelasi. Dalam penelitian ini pengamatan hanya dilakukan pada satu periode yang sama karena tidak ada bentuk gangguan antara periode pengamatan.

Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berdasarkan pada hipotesis penelitian, dimana hipotesis tersebut akan dijabarkan dalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut:

Hipotesis pertama

- $H_{01} : \beta_{1,2}=0$ Penerapan ekonomi kreatif tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.
- $H_{a1} : \beta_{1,2} \neq 0$ Penerapan ekonomi kreatif berpengaruh terhadap tingkat kemandirian daerah.

Hipotesis kedua

- $H_{02} : \beta_{1,2} \leq 0$ Komitmen organisasi tidak mempengaruhi hubungan penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah.
- $H_{a2} : \beta_{1,2} > 0$ Komitmen organisasi mempengaruhi hubungan penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah.

Pengujian hipotesis dan perhitungan yang dilakukan diuraikan sebagai berikut:

1) **Uji Statistik F**

Uji ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara bersama-sama atau secara keseluruhan (uji hipotesis pertama). Untuk menghitung nilai F hitung digunakan rumus : (Gujarati, 2003:258)

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2) / (n - k)}$$

dimana:

- R^2 adalah Koefisien determinasi
- k adalah Jumlah variabel independen
- n adalah Ukuran sampel

Hasil perhitungan F_{hitung} yang selanjutnya dibandingkan dengan F_{tabel} dengan tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$) dengan kriteria keputusan sebagai berikut:

- ❖ Jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak
- ❖ Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$: H_0 ditolak atau H_a diterima

2) **Uji Koefisien determinasi (R^2)**

Uji Koefisien Determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat besar variasi dari variabel independen secara bersama-sama dalam mempengaruhi variabel dependen dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$R^2 = \frac{JK_R}{JK_Y}$$

dimana :

JK_R : jumlah kuadrat regresi (*explained sum of Square*)

JK_Y : jumlah total kuadrat (*total sum of square*)

Nilai R^2 berada antara 0 dan 1. Semakin mendekati nilai 1 atau 100%, maka semakin besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen.

3) **Uji Statistik t**

Uji Parsial atau disebut dengan *uji t*, yaitu menguji signifikan konstanta dan variabel independen yang terdapat dalam persamaan tersebut secara individu apakah berpengaruh terhadap nilai variabel independen (Gujarati, 2003:259). Rumusnya :

$$t = \frac{\beta_i}{S_{\beta_i}}$$

dimana :

β_i adalah koefisien regresi untuk masing-masing variabel bebas

S_{β_i} adalah standard error dari β_i

Dari perhitungan tersebut maka selanjutnya membandingkan antara nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} pada tingkat keyakinan 95% ($\alpha = 0,05$), dengan kriteria keputusan :

- ❖ Jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$: H_0 diterima atau H_a ditolak
- ❖ Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$: H_a diterima atau H_0 ditolak

Menghitung Koefisien Determinasi Parsial

Koefisien determinasi parsial dihitung untuk menentukan besarnya pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Koefisien determinasi parsial diperoleh dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi parsial untuk masing-masing variabel independen. Untuk mengetahui keeratan hubungan antar variabel independen terhadap variabel dependen, digunakan kriteria koefisien korelasi sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.2 berikut :

Tabel 1
Pedoman Interpretasi Koefisien Korelasi

Frekuensi	Interprestasi
0,00 – 0,199	Sangat rendah
0,20 – 0,399	Rendah
0,40 – 0,599	Sedang / Cukup
0,60 – 0,799	Kuat
0,80 – 1,000	Sangat kuat

Sumber : Sugiyono (2011:214)

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini akan diuraikan hasil penelitian berkaitan dengan pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebar kepada SKPD Pemerintahan Kota Lhokseumawe. Rekap jumlah kuesioner yang disebar kepada responden dirangkum pada tabel berikut:

Tabel 2
Rincian Pengembalian Kuesioner (*Respond Rate*)

Responden	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali	Respond Rate	Keterangan
Sebanyak 35 SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Lhokseumawe	130 Lembar Kuesioner	123 Lembar Kuesioner	95%	- 2 Kuesioner tidak kembali - 5 Kuesioner tidak terisi lengkap

Gambar 1. Grafik P-P Plot Normalitas

Analisis Data dan Pengujian Hipotesis

Pada sub bab ini, hipotesis konseptual yang diajukan sebelumnya akan diuji dandibuktikan dengan menggunakan pengujian statistik. Hipotesis konseptual yang diajukan adalah diduga adanya pengaruh dari penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah yang di moderasi oleh komitmen organisasi. Adapun metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah *moderated regression analysis* (MRA) dengan model sebagai berikut:

- 1) $Y = a + b_1X_1 + e_i$
- 2) $Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1*X_2 + e_i$

Dimana:

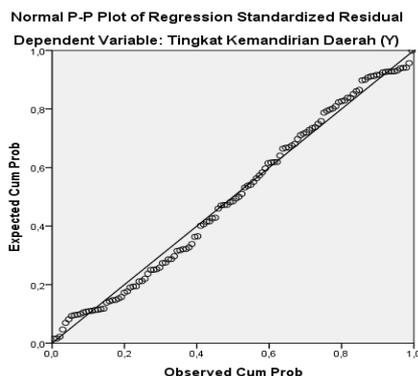
- Y = Tingkat Kemandirian Daerah
- a = Konstanta
- bi = Koefisien Regresi
- X₁ = Penerapan Ekonomi Kreatif
- X₂ = Komitmen Organisasi
- X₁*X₂ = Interaksi antara X₁ dengan X₂
- e_i = Residual

Dikarenakan regresi ini mensyaratkan menggunakan data interval dan skala likert yang digunakan diasumsikan ordinal, maka terlebih dahulu perlu dilakukan transformasi kedalam bentuk interval. Transformasi data dilakukan menggunakan *methode of successive interval* atau MSI yang dihitung menggunakan program STAT97.

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Pengujian asumsi normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual (e_i) dalam model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik seharusnya memiliki residual yang terdistribusi secara normal. Salah satu cara untuk mendeteksi masalah normalitas ini dapat dilihat dari sebaran data residu pada grafik p-p plot. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar grafik berikut:



b. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan adanya korelasi diantara atau semua variabel bebas yang dilibatkan kedalam model regresi. Pengujian masalah multikolinearitas dapat dideteksi dari nilai *tolerance* dan VIF (*Variance Inflation Factor*). Jika nilai Tol lebih besar 0,1 dan VIF kurang dari 10 dapat diputuskan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam model regresi yang akan dibentuk.

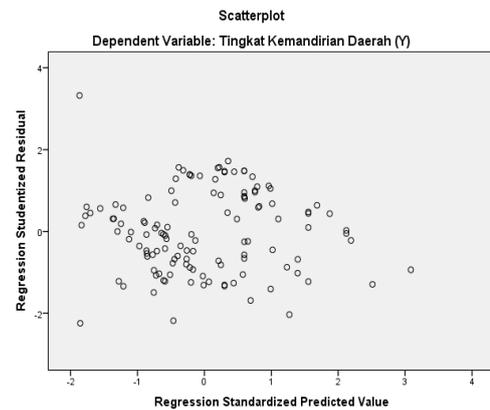
Tabel 3
Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 Penerapan Ekonomi Kreatif (X ₁)	0,910	1,099
Komitmen Organisasi (X ₂)	0,907	1,103
X ₁ *X ₂	0,918	1,089

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

c. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk menguji homogenitas varians residu dalam model regresi, dimana model regresi yang baik mensyaratkan terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Salah satu cara mendeteksi heteroskedastisitas ini dapat dilihat dari grafik scatterplot antara nilai prediksi variabel bebas yaitu ZPRED dengan residualnya yaitu SRESID. Jika titik-titik tersebar secara acak dan tidak membentuk sebuah pola, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Hasil pengujian dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Grafik Scatterplot Heteroskedastisitas

Pengaruh Penerapan Ekonomi Kreatif terhadap Tingkat Kemandirian Daerah yang Dimoderasi Oleh Komitmen Organisasi

Persamaan regresi yang akan dibentuk adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_1*X_2 + e_i$$

Dimana:

- Y = Tingkat Kemandirian Daerah

- a = Konstanta
- b_i = Koefisien Regresi
- X_1 = Penerapan Ekonomi Kreatif
- X_2 = Komitmen Organisasi
- $X_1 * X_2$ = Interaksi antara X_1 dengan X_2
- e_i = Residual

a. Regresi Moderasi (MRA)

Hasil pengujian dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel 4
Hasil Regresi Moderasi (MRA)
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Correlations
	B	Std. Error	Beta			
1 (Constant)	-12,621	3,034		-4,160	0,000	
Penerapan Ekonomi Kreatif (X_1)	0,248	0,042	0,388	5,952	0,000	0,536
Komitmen Organisasi (X_2)	0,336	0,046	0,477	7,307	0,000	0,604
$X_1 * X_2$	0,729	0,351	0,135	2,078	0,040	0,330

a. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

Persamaan regresi yang menjelaskan pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah yang dimoderasi oleh komitmen organisasi adalah sebagai berikut:

$$Y = -12,621 + 0,248 X_1 + 0,336 X_2 + 0,729 X_1 * X_2$$

Secara statistik, nilai-nilai dalam persamaan regresi di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Konstanta sebesar -12,621 menunjukkan nilai prediksi untuk persentase skor tingkat kemandirian daerah jika penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi dan interaksi antara keduanya sangat buruk atau bernilai 0 (nol).
- 2) Koefisien regresi untuk penerapan ekonomi kreatif adalah sebesar 0,248 dengan koefisien bernilai positif yang menunjukan bahwa setiap terjadinya peningkatan skor penerapan ekonomi kreatif dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan persentase skor tingkat kemandirian daerah sebesar 0,248%.
- 3) Koefisien regresi untuk komitmen organisasi adalah sebesar 0,336 dengan koefisien bernilai positif yang menunjukan setiap terjadinya peningkatan skor komitmen organisasi dan variabel bebas lainnya diasumsikan konstan, diprediksikan akan meningkatkan persentase skor tingkat kemandirian daerah sebesar 0,336%.

b. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F)

Uji statistika yang digunakan untuk menguji hipotesis simultan ini adalah uji F. Nilai F_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam uji simultan ini adalah sebesar 2,681 yang diperoleh dari lampiran tabel distribusi F dengan $\alpha = 5\%$, $df_1 (k) = 2$ dan $df_2 (n - (k+1)) = 119$.

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$
- 2) Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $F_{hitung} < F_{tabel}$

Rumusan hipotesis simultan yang akan diuji adalah sebagai berikut:

$H_0 : \beta_i = 0$ Penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif dengan komitmen organisasi) secara simultan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_a : \beta_i \neq 0$ Penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif dengan komitmen organisasi) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%) dengan hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F_{hitung} sebesar 46,636 jatuh di daerah penolakan H_0 , maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti penerapan ekonomi kreatif, komitmen organisasi dan interaksi antara keduanya (penerapan ekonomi kreatif dengan komitmen organisasi) secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

c. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

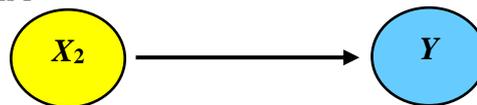
Nilai t_{tabel} yang digunakan sebagai nilai kritis dalam pengujian hipotesis parsial ini adalah sebesar 1,980 yang diperoleh dari tabel distribusi t dengan α sebesar 5% dan $df (n - (k+1)) = 119$ untuk uji dua pihak (*two tailed*).

Kriteria pengambilan keputusan dalam uji t ini adalah sebagai berikut:

- 1) Tolak H_0 dan terima H_a jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$
- 2) Terima H_0 dan tolak H_a jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$

Rumusan hipotesis parsial yang akan diuji adalah sebagai berikut:

Hipotesis I

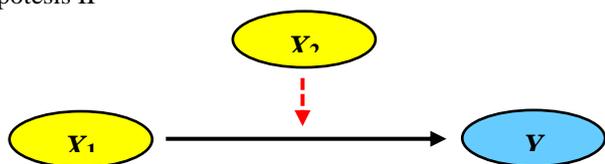


$H_{02} : \beta_2 = 0$ Komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

$H_{a2} : \beta_2 \neq 0$ Komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%), yang menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} sebesar 7,307 jatuh di daerah penolakan H_0 , maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak H_0 dan menerima H_a yang berarti bahwa komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, dimana semakin baiknya komitmen organisasi dipastikan akan mampu meningkatkan kemandirian daerah.

Hipotesis II



- Ho₃ : β₃ = 0 Penerapan ekonomi kreatif yang dimoderasi oleh komitmen organisasi tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.
- Ha₃ : β₃ ≠ 0 Penerapan ekonomi kreatif yang dimoderasi oleh komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah.

Taraf signifikansi (α) yang digunakan adalah sebesar 0,05 (5%) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 2,078 jatuh di daerah penolakan Ho, maka dengan taraf kepercayaan sebesar 95% dapat diputuskan untuk menolak Ho dan menerima Ha yang berarti bahwa penerapan ekonomi kreatif yang dimoderasi oleh komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, dimana semakin baiknya penerapan ekonomi kreatif dan didukung komitmen organisasi yang kuat dipastikan akan mampu meningkatkan kemandirian daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi ini merupakan variabel moderasi yang mampu memperkuat pengaruh dari penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah.

d. Koefisien Determinasi

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,735 ^a	0,540	0,529	2,89957

a. Predictors: (Constant), X₁*X₂, Penerapan Ekonomi Kreatif (X₁), Komitmen Organisasi (X₂)

b. Dependent Variable: Tingkat Kemandirian Daerah (Y)

Dari Tabel 5. di atas, diperoleh koefisien determinasi sebesar 0,540 atau dengan kata lain penerapan ekonomi kreatif yang dimoderasi oleh komitmen organisasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 54,0% terhadap tingkat kemandirian daerah, sedangkan sebanyak (1-R²) 46% sisanya merupakan besarnya kontribusi yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.

Untuk mengetahui kontribusi pengaruh secara parsial, dapat diketahui dari hasil perkalian antara nilai beta yang merupakan koefisien regresi terstandarkan (*standardized coefficients*) dengan *zero-order* (*ryx*) yang merupakan nilai korelasi parsial. Hasil perhitungan koefisien determinasi parsial disajikan pada Tabel 6 berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi Parsial

Model	Standardized Coefficients	Correlations	Partial Coefficient of Determination
	Beta	Zero-order	
Komitmen Organisasi (X ₂)	0,477	0,604	0,288
Interaksi X ₁ *X ₂	0,135	0,330	0,045

Dari Tabel 6 di atas, diketahui komitmen organisasi secara parsial memberikan kontribusi pengaruh sebesar 28,8% terhadap tingkat kemandirian daerah, adapun interaksi (X₁*X₂) antara penerapan ekonomi kreatif dengan komitmen organisasi memberikan kontribusi pengaruh sebesar 4,5% terhadap tingkat kemandirian daerah. Rekapitulasi besar kontribusi pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah sebelum dan setelah dimoderasi oleh komitmen organisasi disajikan dalam Tabel 7 berikut:

Tabel 7
Rekapitulasi Besar Kontribusi Pengaruh Sebelum dan Setelah Dimoderasi

Model	R ²	R ² dalam %	Pengaruh Faktor Lain 1-R ²
X ₁ - Y	0,287	28,7%	71,3%
X ₁ Moderasi X ₂ - Y	0,540	54,0%	46,0%

Berdasarkan hasil yang tersaji pada Tabel 5.18 di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan kontribusi pengaruh yang semula 28,7% menjadi 54%, hal ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi mampu memperkuat pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah atau dengan kata lain variabel komitmen organisasi ini sukses menjalankan fungsinya sebagai variabel moderasi.

Prospek Pengembangan Ekonomi Kreatif

Melihat hasil uji hipotesis terhadap tiga variabel yang saling mempengaruhi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai kontribusi akhir pada model moderasi yang meningkat dari 28,7% menjadi sebesar 54% atau terjadi peningkatan sebesar 46,9% menunjukkan bahwa terdapat prospek yang sangat besar bagi pemerintah daerah Kota Lhokseumawe untuk dapat mengembangkan ekonomi kreatif menjadi salah satu keunggulan daerah. Melalui komitmen yang tinggi bagi seluruh aparatur pemerintah daerah, akan mampu melahirkan berbagai program dan konsep baru terhadap pola pengembangan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif tidak hanya sekedar meningkatkan pendapatan daerah atau masyarakat, namun ekonomi kreatif harus menunjukkan ciri khas atau keunggulan daerah yang pada akhirnya dapat menjadi "icon" daerah.

Pemerintah Kota Lhokseumawe khususnya harus mampu melihat potensi daerah dalam mengembangkan potensi ekonomi kreatif pada berbagai sub sektor dan mampu membedakan dengan daerah lain di Provinsi Aceh. Pemerintah dapat melakukan kembali riset yang lebih tajam terhadap potensi daerah yang memungkinkan untuk dikembangkan dan dapat dilakukan masyarakat, sehingga relevansi kepentingan pemerintah daerah dengan masyarakat akan menjadi satu kolaborasi yang tepat. Namun harus disadari bahwa pengembangan ekonomi kreatif tidak akan berkembang apabila tidak didukung oleh pengembangan potensi wisata yang saat ini telah menjadi primadona dalam menghasilkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Melalui pengembangan ekonomi kreatif, seharusnya pemerintah daerah sudah harus memikirkirkan juga bagaimana pariwisata dikembangkan. Kedua hal tersebut merupakan kombinasi yang sangat sesuai dalam menghasilkan PAD.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, peneliti memperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat sangat setuju dengan penerapan ekonomi kreatif di wilayah Pemerintahan Kota Lhokseumawe yang nantinya diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat.
2. Seluruh SKPD pada pemerintahan Kota Lhokseumawe memiliki komitmen organisasi yang hampir baik.
3. Tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe tergolong cukup baik.
4. Penerapan ekonomi kreatif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah pada pemerintah Kota Lhokseumawe dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar yaitu sebesar 28,7% sedangkan sebanyak 71,3% sisanya merupakan kontribusi pengaruh dari faktor lainnya yang tidak diteliti.
5. Penerapan ekonomi kreatif yang dimoderasi oleh komitmen organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kemandirian daerah, dimana interaksi yang terjadi menunjukkan bahwa komitmen organisasi ini mampu memperkuat pengaruh penerapan ekonomi kreatif terhadap tingkat kemandirian daerah dengan kontribusi pengaruh yang diberikan sebesar 54,0%, sedangkan sebanyak 46% sisanya merupakan besarnya kontribusi yang diberikan oleh faktor lainnya yang tidak diteliti.
6. Pemerintah Kota Lhokseumawe memiliki prospek pengembangan ekonomi kreatif yang tinggi untuk meningkatkan PAD. Hal ini dikarenakan bahwa komitmen pemerintah daerah serta dukungan masyarakat memiliki relevansi yang kuat.

REFERENSI

- [1] Abdul Halim. (2004). *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. Penerbit UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- [2] Arfan Ikhsan dan Ishak. (2005). *Akuntansi Keprilakuan*. Jakarta: Salemba Empat.
- [3] Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). *Kota Lhokseumawe Dalam Angka Tahun 2016*. Pemerintah Kota Lhokseumawe.
- [4] Bakri. (2018). *Ekonomi Kreatif Aceh Belum Maksimal*. <http://aceh.tribunnews.com/2018/10/26/ekonomi-kreatif-aceh-belum-maksimal>. Diakses tanggal 1 Maret 2019.
- [5] Cherrington. (1996). *Accounting Information System and Business Organization*. Addison-Wesley.
- [6] Gujarati, Damodar N. (2003). *Basic Econometrics*. 4th Edition, New York, McGraw Hill. New York.
- [7] Gunawan Sudarmanto. (2005). *Statistik terapan Berbasis Komputer Dengan Program IBM SPSS Statistik 19*. PT. Penerbit: Citra Wacana Media. Jakarta
- [8] Imam Ghozali. (2002). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- [9] Meyer, John P. and Allen, Natalie J. (1997). *Commitment in the Workplace: Theory, Research, and Application*. Publisher: SAGE Publications Inc.
- [10] Mowday, Steers and Porter's. (1979). *Organizational Behavior; Concept, Controversies, Application*. International Edition. Eighth Edition. Prentice Hall, pp. 478-487.
- [11] Muzakar Isa. (2016). *Model Penguatan Kelembagaan Industri Kreatif Kuliner Sebagai Upaya Pengembangan Ekonomi Daerah*. Prosiding Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis dan Call For Paper FEB UMSIDA 2016.
- [12] Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (2002). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Manajemen dan Akuntansi*. BPFE-UGM. Yogyakarta.
- [13] Osborne, David and Gaebler, Ted. (1992). *Reinventing Government*. NY Penguin Press: New York.
- [14] Reiza Miftah Wirakusuma. (2014). *Analisis Kegiatan Ekonomi Kreatif Di Kawasan Wisata Bahari Pulau Tidung Kepulauan Seribu*. Jurnal Manajemen Resort & Leisure. Volume 11 Nomor 1, April 2014.
- [15] Sekaran, Uma. (2003). *Research Methods for Business, A Skill building Approach*. Fourth Edition. Wiley. Pp. 87.
- [16] Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- [17] Suharsimi Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Rineke Cipta, Jakarta.
- [18] Suryana. (2013). *Ekonomi Kreatif, Ekonomi Baru: Mengubah Ide dan Menciptakan Peluang*. Penerbit: Salemba Empat. Jakarta.
- [19] Wiener. (1982). *Management : A Global Prespective*. McGraw-Hill Education (Asia).
- [20] Zulkarnaini, Zuarni and Muhammad Arifai. (2018). *How Does Reinforce The Local Original Revenue? Developing of Sharia Based-Tourism*. International Journal of Social Science and Economic Research. Volume: 03, Issue:12, December 2018. www.ijsser.com. pp.6776-6795